

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) TERHADAP EFISIENSI PERBANKAN DI INDONESIA PERIODE 2015-2019

THE EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TOWARDS BANKING EFFIECIENCY IN INDONESIA 2015-2019 PERIOD

Agung Rachmad Kurniawan¹, Dewa Putra Krishna Mahardika²

^{1,2} Universitas Telkom, Bandung

agungrachmadk@student.telkomuniversity.ac.id¹, dewamahardika@telkomuniversity.ac.id²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap efisiensi perbankan di INDONESIA periode 2015-2019. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah dewan direksi, dewan komisaris, dan kepemilikan institusional. Variabel dependen pada penelitian ini menggunakan rasio efisiensi.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 yaitu sebanyak 43 perusahaan perbankan. Sampel dalam penelitian ini adalah 10 perusahaan yang diambil berdasarkan teknik pengambilan sampel Purposive Sampling.

Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Nilai signifikansi pada variabel Dewan Direksi (X1) adalah $0,000 < 0,05$, dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Dewan Direksi (X1) berpengaruh signifikan terhadap BOPO (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dewan Komisaris (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap BOPO (Y). Kepemilikan Institusional (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap BOPO (Y). Uji F menunjukkan bahwa F hitung sebesar $57,396 > F \text{ tabel } (2,80)$, artinya bahwa variabel bebas yaitu Dewan Direksi (X1), Dewan Komisaris (X2), dan Kepemilikan Institusional (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu BOPO (Y). Nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,789 artinya hal ini menunjukkan bahwa Dewan Direksi (X1), Dewan Komisaris (X2), dan Kepemilikan Institusional (X3) secara bersama-sama memberikan sumbangan terhadap BOPO (Y) sebesar 78,9%, dan sisanya (21,1%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian.

Kata kunci : Penerapan, *Good Corporate Governance* (GCG), Efisiensi Perbankan

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) on banking efficiency in INDONESIA for the 2015-2019 period. The type of research used in this research is quantitative research. The independent variables in this study were the board of directors, the board of commissioners, and institutional ownership. The dependent variable in this study uses the efficiency ratio.

*The population used in this study were all banks listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019, namely 43 banking companies. The sample in this study were 10 companies that were taken based on the purposive sampling technique. Data collection techniques with literature study and documentation. The data analysis technique used in this research is quantitative descriptive analysis. The significance value of the variable of the Board of Directors (X1) is $0.000 < 0.05$, thus it can be concluded that the variable of the Board of Directors (X1) has a significant effect on BOPO (Y). The results showed that the variable of the Board of Commissioners (X2) had no significant effect on BOPO (Y). Institutional Ownership (X3) has no significant effect on BOPO (Y). The F test shows that the calculated F is $57.396 > F \text{ table } (2.80)$, meaning that the independent variables, namely the Board of Directors (X1), Board of Commissioners (X2), and Institutional Ownership (X3) simultaneously have a significant effect on the dependent variable, namely BOPO (Y). The value of the coefficient of determination (*R Square*) of 0.789 means that this indicates that the Board of Directors (X1), Board of*

Commissioners (X2), and Institutional Ownership (X3) jointly contribute to BOPO (Y) of 78.9%, and the rest (21.1%) was influenced by other factors not included in the study.

Key words : Implementation, Good Corporate Governance (GCG), Banking Efficiency

1. Pendahuluan

Good corporate governance adalah sistem yang mengatur dan mengelolah serta mengawasi pengendalian usaha dalam menaikkan nilai saham, dan juga sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan dan masyarakat sekitar. dalam keberlangsungan suatu perusahaan adanya konsumen dan investor merupakan aspek terpenting, jika pelayanan pada konsumen bagus maka konsumen akan meningkat dan menarik investor dalam menginvestasikan dananya (Kasmir, 2015)^[1] Kesejahteraan pemilik serta pemegang saham merupakan tujuan terpenting dalam perusahaan, dasar teori *good corporate governance* adalah *agency theory* yaitu merupakan masalah muncul ketika pengelola perusahaan terpisah dari pemiliknya hakikatnya seorang pemilik ingin memiliki laba yang tinggi sedangkan dengan adanya kewenangan manager dalam mengelola dana investor membuat manager dapat memanfaatkan untuk memperkaya dirinya sendiri.

Dalam *good corporate governance* terdapat pengukuran dewan direksi dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau dimaksud dengan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurus perseroan untuk kepentingan perseroan, dewan direksi berfungsi untuk mengurus perusahaan. Dewan direksi dipilih oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mewakili para pemegang saham tersebut. Peran direksi sangat penting dan cukup menentukan bagi keberhasilan *good corporate governance* (Effendi, 2016)^[2] Jumlah anggota dewan direksi mempengaruhi kinerja keuangan dikarenakan dewan direksi bertanggung jawab atas tujuan perusahaan yaitu dengan meningkatkan laba dalam perusahaan secara efektif dan efisien dalam mencapai sasaran yang ditentukan dari sisi kepentingan perusahaan dan paara pemegang saham sehingga investor mempunyai pertimbangan dalam kegiatan investasi jangka panjang. Hasil penelitian yang dilakukan Lapriska (2018) menyatakan bahwa variabel *good corporate governance* tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan Pembobolan Citibank pada tanggal 27 juli 2015 sebesar 17 miliar kejahatan ini dilakukan oleh *senior manager* Citibank yaitu Malinda Dee hal ini tercemin dari menurunnya laba bersih yang ada pada Citibank pada tahun 2014 dengan laba bersih sebesar Rp.2.505 triliun menurun menjadi Rp.1.567 triliun pada tahun 2015. Penurunan ini terjadi karena banyak nasabah Citibank yang melakukan pemindahan uangnya ke bank lain yang disebabkan karena mereka takut mengalami kejadian yang serupa, dan juga karena calon nasabah mulai berpikir ulang untuk meletakkan dananya di Citibank. Selain itu pada tanggal 9 maret 2017 terdapat kasus pembobolan 7 bank dengan kerugian Rp. 836 miliar dengan modus mengajukan kredit ke 7 bank dengan cara mempengaruhi manager bank untuk melakukan penyimpangan. Akan tetapi, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim tak mau menyebutkan ketujuh bank yang dibobol tersebut. Ia hanya menyebutkan bahwa dari tujuh tersebut, ada yang merupakan bank swasta, ada pula bank pelat merah. Untuk porsi bank pemerintah kerugiannya sebesar Rp 398 miliar, sedangkan bank swasta Rp 438 miliar (Kontan.co.id, 2017).

Dari berdasarkan kasus 2 perusahaan berpengaruh terhadap pengukuran GCG yaitu dewan direksi dan komisaris independen karena keterlibatannya orang dalam perusahaan (www.detik.com).

Peningkatan kualitas pelaksanaan *good corporate governance* merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Pengelolaan perbankan yang baik melalui penerapan GCG akan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta mempermudah memperoleh dana

pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid yang pada akhirnya menjadikan pertumbuhan ekonomi memiliki peran besar dalam perekonomian negara (Frans, Karamoy, & Z. Tirayoh, 2017)^[3]

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, bank wajib secara berkala melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG, sehingga bank dapat segera menetapkan rencana tindak (*action plan*) yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan apabila masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan GCG. Dalam menjalankan penilaian tersebut, pihak bank wajib mengisi Kertas Kerja *Self Assessment* GCG dan menentukan besaran nilai peringkat dari setiap kriteria dengan membandingkannya dengan indikator yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penilaian pelaksanaan GCG dari *self assessment* memberikan 11 faktor penilaian. 11 penilaian tersebut untuk menunjukkan analisis *self assessment* yang dinilai sendiri oleh bank dari hasil mengisi kertas kerja *self assessment* yang telah ditetapkan. Dari hasil *self assessment*, bank dapat menetapkan nilai komposit dari jumlah hasil pembobotan dari setiap 11 faktor penilaian tersebut. Nilai komposit kemudian yang menghasilkan penilaian praktik GCG dalam suatu bank dari predikat komposit yang telah ditetapkan.

Dalam prakteknya, penerapan GCG pada perbankan Indonesia masih sangat perlu ditingkatkan. Menurut Ketua *Indonesia Institute for Corporate Directorship*, Sigit Pramono, Indonesia hanya memiliki lima perusahaan yang sudah masuk dalam kategori baik dalam penerapan GCG. Adapun, tiga di antaranya adalah bank papan atas. Sementara bank lainnya masih dalam tahap implementasi menengah (Finansial.bisnis.com, 2019)

Kelemahan dari GCG ini terlihat dari data pertumbuhan profit dan aset perbankan, Dari grafik di bawah terlihat bahwa terjadi penurunan *Operational Profit growth* di industri perbankan dalam 5 tahun sejak 2011 sampai dengan 2016.

Berikut data Skor *Good Corporate Governance* Pada Perbankan Tahun 2012-2016.

Tabel 1.1 Skor *Good Corporate Governance* Pada Perbankan Tahun 2012-2016

Tahun	Peringkat					Jumlah	Laba Bersih
	1	2	3	4	5		
2012	9	16	5	1	0	31	Rp1.814 triliun
2013	6	27	2	1	0	36	Rp 128 miliar
2014	5	28	3	1	0	37	Rp2.109 triliun
2015	4	31	2	1	0	38	Rp2.096 triliun
2016	2	29	6	0	0	38	Rp2.015 triliun

Sumber: OJK, 2017

Tabel 1.1 merupakan jumlah perusahaan yang mencantumkan laporan *good corporate governance* yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2012-2013 skor GCG mengalami kenaikan dari 31 menjadi 36 dan tahun 2014-2015 mengalami sedikit peningkatan dari 37 menjadi 38, di tahun 2016 skor GCG mendapatkan skor seperti tahun sebelumnya yaitu 38. Pada tahun 2012-2016 jumlah bank yang menyertakan laporan GCG terus mengalami peningkatan sedangkan laba mengalami penurunan dari tahun 2014-2016. Kategori skor GCG dibagi dalam lima peringkat, jumlah perusahaan yang masuk peringkat 1 dalam pelaporan GCG tiap tahun mengalami penurunan. Semakin banyak perusahaan yang tidak menyertakan laporan GCG secara lengkap maka turun ke peringkat 2 hingga peringkat 5. Penerapan GCG yang baik yaitu jika skor GCG meningkat dan laba juga meningkat. Dari penjelasan tersebut dapat

disimpulkan bahwa telah terjadi penurunan di tahun 2014-2016, hal ini mengindikasikan kinerja perbankan yang semakin menurun.

Menurut Ketua Dewan Komisiner OJK yaitu Muliawan D Hadad mengatakan bahwa penerapan GCG secara baik dan berkelanjutan dapat berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan, keseimbangan kerangka kerja serta pemahaman menyeluruh dari manajemen perusahaan (Liputan6.com, 2014). Dengan penerapan GCG yang baik, perusahaan bisa melakukan manajemen perusahaan secara handal, memitigasi risiko, menjaga standar kualitas produk, meningkatkan akses permodalan, dan membuat perusahaan menjadi lebih efisien. Efisiensi perbankan memiliki peran yang penting dalam mendukung perekonomian Indonesia. Kelangsungan operasional perbankan bergantung pada kemampuannya dalam mempertahankan daya saing yang tercermin pada efisiensi operasional perbankan tersebut

Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengukur tingkat efisiensi bank dari dua indikator yakni rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) dan rasio margin bunga bersih (*net interest margin*/NIM).

Rasio BOPO merupakan rasio yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam mengukur tingkat efisiensi dari suatu bank. Rasio BOPO digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengatur biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio BOPO mengindikasikan bahwa bank telah semakin efisien dalam mengatur biaya operasionalnya, sehingga risiko yang diterima bank akan semakin kecil serta profitabilitas akan meningkat.

Rasio *Net Interest Margin* (NIM) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Rasio ini berbanding lurus dengan pendapatan bunga yang diterima oleh bank. Semakin besar pendapatan bunga yang diterima bank maka semakin besar rasio atau NIM bank tersebut, hal ini menandakan bahwa bank bisa bekerja dengan baik untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi.

Beberapa penelitian terdahulu tentang hubungan antara penerapan GCG dengan efisiensi perbankan Indonesia memberikan hasil yang berbeda, antara lain penelitian yang dilakukan Yantining et al (2016), Ghofur et al (2018), serta Pudail et al (2018) pada perbankan syariah Indonesia menunjukkan bahwa kualitas penerapan GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan BOPO. Tetapi penelitian Prasjo (2015) yang juga dilakukan pada perbankan syariah Indonesia menemukan bahwa GCG memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap BOPO. Sedangkan penelitian yang dilakukan Hartutik dan Asmita (2016) memperlihatkan tidak ada pengaruh antara penerapan GCG dengan BOPO.

Penelitian Tjondro dan Wilopo (2011) menemukan adanya hubungan yang positif dan signifikan penerapan GCG dengan rasio NIM perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sejalan dengan hasil di atas adalah penelitian yang dilakukan Widiamsa (2016) serta Feldareza dan Febrianto (2019). Sementara penelitian Pratiwi (2016) menemukan bahwa penerapan GCG pada perbankan syariah Indonesia tidak memiliki pengaruh terhadap rasio NIM.

2. Dasar Teori dan Metodologi

2.1 Tinjauan Pustaka Penelitian

2.1.1 Teori Agency

Teori agensi pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976)^[4] Konsep teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen. Prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen (Anthony dan Govindarajan, 2005). Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai prinsipal dan CEO (*Chief Executive Officer*) sebagai agen mereka. Pemegang saham mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Teori agensi mengasumsikan bahwa CEO (agen) memiliki lebih banyak informasi daripada

prinsipal. Hal ini dikarenakan prinsipal tidak dapat mengamati kegiatan yang dilakukan agen secara terus-menerus dan berkala. Karena prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja agen, maka prinsipal tidak pernah dapat merasa pasti bagaimana usaha agen memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan. Situasi inilah yang disebut asimetri informasi. Konflik inilah yang kemudian dapat memicu biaya agensi.

2.1.2 Definisi *Good Corporate Governance* (GCG)

GCG secara singkat dapat didirikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*Value added*) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang Bersih, Transparan, dan Profesional (BTP). Implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten di perusahaan akan menarik minat para investor, baik domestik maupun asing. Hal ini sangat penting bagi perusahaan yang akan mengembangkan usahanya, seperti melakukan investasi baru maupun proyek ekspansi.

2.1.3 Definisi Efisiensi

Efisiensi merupakan rasio antara output dan input, dan perbandingan antara masukan dan keluaran. Apa saja yang dimaksudkan dengan masukan serta bagaimana angka perbandingan tersebut diperoleh, akan tergantung dari tujuan penggunaan tolak ukur tersebut. M. D. Huri dan Indah Susilowati (2004)^[5] menjelaskan bahwa efisiensi dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan (input), atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari satu input yang digunakan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Efisiensi

Dewan Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas kepengurusan bank. Dewan Direksi berperan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan digunakan baik kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang. Dewan Direksi merupakan perwakilan para pemegang saham dalam pengelolaan perusahaan. Dewan Direksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dewan Direksi harus dapat memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dewan (Rustam, 2013:400-414).

H1: Terdapat pengaruh dewan direksi terhadap efisiensi

2.2.2 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Efisiensi

Peranan aktif dari dewan komisaris dapat dilihat dari karakteristiknya, yang terdiri dari: ukuran dewan, independensi dewan, struktur kepemimpinan, dan kesibukan dari dewan, berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi investasi dari perusahaan (Chen *et al.* 2013)^[6] Hal ini dikarenakan bahwa selain peran monitoring perusahaan, dewan bertindak untuk melayani manajemen perusahaan untuk dapat bekerja secara efisien dalam menjalankan pengelolaan perusahaan.

Dewan komisaris (*board of directors*) mempunyai peranan penting dalam menyediakan laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya. Dewan komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham untuk memastikan sumber daya produktif yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara efektif dan efisien demi kepentingan pemegang

saham (Butar Butar, 2014) Lebih lanjut dewan komisaris secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mengurangi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan manajemen. Keberadaan komisaris akan membuat kualitas laba semakin tinggi sehingga pengambilan keputusan investasi menjadi semakin baik (Simanungkalit, 2017)^[7]

H2: Terdapat pengaruh dewan komisaris terhadap efisiensi

2.2.3 Non Performance Financial Terhadap Profitabilitas

Chang *et al.* (2006) menunjukkan bahwa semakin baik analisa yang diberikan dalam meningkatkan kinerja perusahaan melalui kebijakan finansial yang dihasilkan, dimana akan meminimalkan *under-investment*. Dari penelitian sebelumnya didapatkan kesimpulan bahwa terjadinya efisiensi investasi pada suatu perusahaan dipengaruhi oleh suatu keputusan strategis *top management*, dimana di dalamnya adalah merupakan perwakilan dari investor itu sendiri. Sehingga, keberadaan investor institusional yang memberikan pengaruh terhadap mekanisme GCG perusahaan dengan menempatkan perwakilannya dalam susunan dewan komisaris maupun komite audit dapat memberikan pengaruh positif terhadap efisiensi investasi perusahaan.

Zheka (2003) memberi bukti bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap efisiensi investasi. Semakin besar kepemilikan institusional mengindikasikan bahwa semakin besar monitoring yang dilakukan oleh pihak luar sehingga mendorong pihak manajemen perusahaan untuk melakukan kinerja dengan optimal, sehingga akan meningkatkan integritas penyajian laporan keuangan (Jama'an, 2007)^[8] Hal ini disebabkan karena institusi merupakan badan yang secara profesional dan ahli dalam pengamatan kinerja perusahaan. Lalu dengan kemampuan institusi dalam mengawasi dan menganalisis, perusahaan harus bertindak secara hati – hati dan benar sehingga laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan kenyataan yang ada dan dari laporan keuangan tersebut, manajer melakukan investasi yang baik untuk semua pihak dan efisien dalam pelaksanaannya (Hardi, 2006)

H3: Terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap efisiensi

2.3 Hipotesis Pemikiran

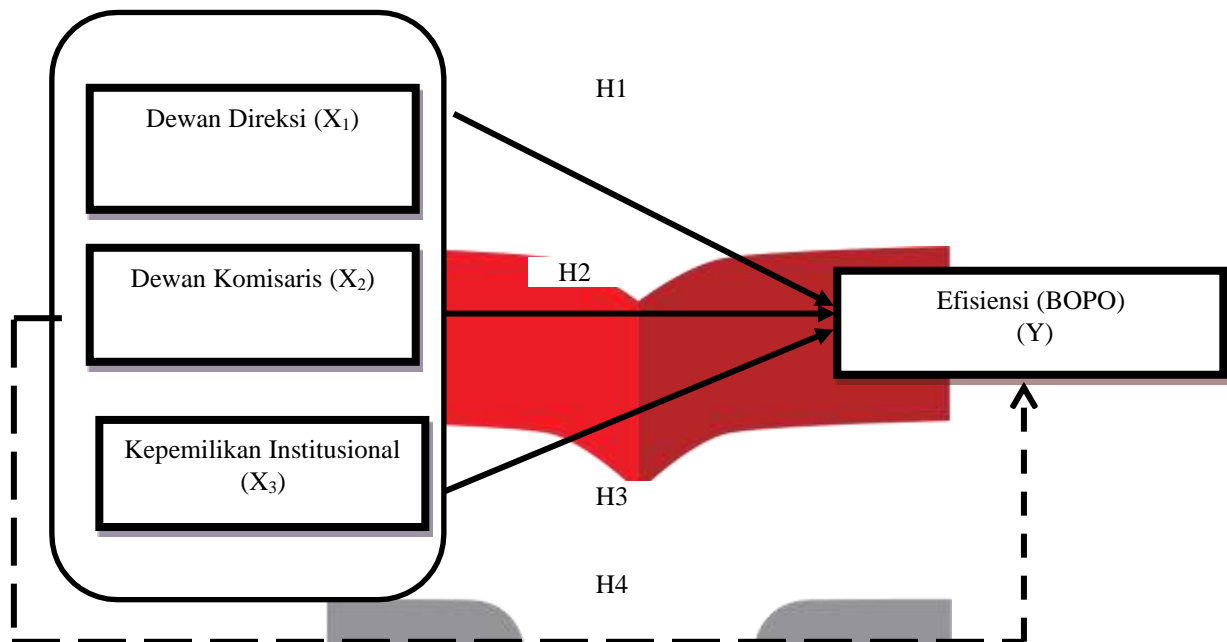
Hipotesis merupakan dugaan mengenai suatu hal atau jawaban sementara suatu masalah dan dapat pula sebagai kesimpulan sementara tentang satu variabel dengan satu atau lebih variabel yang lain. Hipotesis dikatakan sementara karena hipotesis yang disajikan berdasarkan teori. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

H₁ : Terdapat pengaruh positif dan signifikan dewan direksi terhadap efisiensi

H₂ : Terdapat pengaruh positif dan signifikan dewan komisaris terhadap efisiensi

H₃ : Terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemilikan institusional terhadap efisiensi

H₄ : Terdapat pengaruh positif dan signifikan dewan direksi, dewan komisaris, dan kepemilikan institusional terhadap efisiensi



Gambar 2. 1 Hipotesis Pemikiran
Sumber : data yang telah diolah (2020)

Keterangan :

- 1) Berpengaruh Parsial : —————→
 2) Berpengaruh Simultan : - - - - -→

3. Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4.1
Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dewan Direksi	50	5,00	11,00	8,1200	2,26454
Dewan Komisaris	50	3,00	6,00	4,5600	,64397
Kepemilikan Institusional	50	2,44	96,33	26,7852	29,20072
BOPO	50	59,93	96,07	77,3432	10,46361
Valid N (listwise)	50				

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel Dewan Direksi memiliki nilai minimum 5,00, nilai maksimum 11,00, *mean* 8,1200, dan standar deviasi 2,26454. Variabel Dewan Komisaris

memiliki nilai minimum 3,00, nilai maksimum 6,00, *mean* 4,5600, dan standar deviasi 0,64397. Variabel Kepemilikan Institusional memiliki nilai minimum 2,44, nilai maksimum 96,33, *mean* 26,7852, dan standar deviasi 29,20072. Variabel BOPO memiliki nilai minimum 59,93, nilai maksimum 96,07, *mean* 77,3432, dan standar deviasi 10,46361.

3.1.2 Uji Normalitas

Tabel 4.7
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,80445779
Most Extreme Differences	Absolute	,105
	Positive	,105
	Negative	-,070
Test Statistic		,105
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

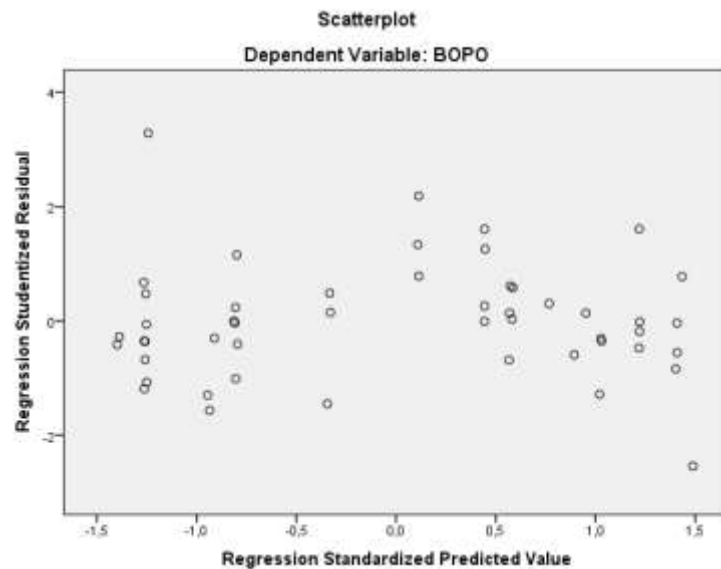
d. This is a lower bound of the true significance.

Dari hasil Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,192 > 0,05$, artinya data berdistribusi normal.

3.1.3 Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4.1
Uji Heteroskedastisitas



Dari Gambar 4.1 terlihat data menyebar secara acak diatas dan dibawah titik 0 pada sumbu Y, maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

3.1.4 Uji Multikolinearitas

Tabel 4.3
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Dewan Direksi	,792	1,263
Dewan Komisaris	,919	1,089
Kepemilikan Institusional	,748	1,338

a. Dependent Variable: BOPO

nilai VIF < 10 untuk semua variabel bebas, begitu juga dengan nilai *tolerance* > 0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada terdapat multikolinearitas antara variabel bebas dalam penelitian ini.

3.1.5 Uji Autokorelasi

Tabel 4.4
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,888 ^a	,789	,775	4,95865	1,276

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Dewan Direksi

b. Dependent Variable: BOPO

dapat dilihat bahwa nilai *Durbin-Watson* $-2 > 1,276 > +2$, artinya tidak terjadi autokorelasi.

3.1.6 Hasil Pengujian Secara Parsial (Uji t)

1. Nilai signifikansi pada variabel Dewan Direksi (X_1) adalah $0,000 < 0,05$, dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Dewan Direksi (X_1) berpengaruh signifikan terhadap BOPO (Y).
2. Nilai signifikansi pada variabel Dewan Komisaris (X_2) adalah $0,955 > 0,05$, dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Dewan Komisaris (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap BOPO (Y).
3. Nilai signifikansi pada variabel Kepemilikan Institusional (X_3) adalah $0,322 > 0,05$, dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Kepemilikan Institusional (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap BOPO (Y).

3.1.7 Analisis Regresi Linear Berganda (R)

1. Nilai $a = 112,305$ menunjukkan bahwa apabila nilai Dewan Direksi (X_1), Dewan Komisaris (X_2), dan Kepemilikan Institusional (X_3) konstan atau tetap (tidak mengalami perubahan) sebesar 0 satuan, maka BOPO (Y) bernilai sebesar 112,305.
2. Nilai $b_1 = -4,250$ menunjukkan bahwa apabila nilai variabel Dewan Direksi (X_1) naik 1 satuan maka BOPO (Y) akan mengalami penurunan sebesar 4,250 dengan asumsi variabel lainnya tetap atau konstan.
3. Nilai $b_2 = 0,065$ menunjukkan bahwa apabila nilai variabel Dewan Komisaris (X_2) naik 1 satuan maka BOPO (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,065 dengan asumsi variabel lainnya tetap atau konstan.
4. Nilai $b_3 = -0,028$ menunjukkan bahwa apabila nilai variabel Kepemilikan Institusional (X_3) naik 1 satuan maka BOPO (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,028 dengan asumsi variabel lainnya tetap atau konstan.

3.1.8 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 4.7
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4233,813	3	1411,271	57,396	,000 ^b
	Residual	1131,058	46	24,588		
	Total	5364,871	49			

a. Dependent Variable: BOPO

b. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Dewan Direksi

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwa F hitung sebesar $57,396 > F$ tabel (2,80), artinya bahwa variabel bebas yaitu Dewan Direksi (X_1), Dewan Komisaris (X_2), dan Kepemilikan Institusional (X_3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu BOPO (Y).

3.1.9 Koefisien Determinansi

Tabel 4.8
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,888 ^a	,789	,775	4,95865	1,276

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Dewan Direksi

b. Dependent Variable: BOPO

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,789 artinya hal ini menunjukkan bahwa Dewan Direksi (X_1), Dewan Komisaris (X_2), dan Kepemilikan Institusional (X_3) secara bersama-sama memberikan sumbangan terhadap BOPO (Y) sebesar 78,9%, dan sisanya (21,1%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian.

3.2 Pembahasan Hasil Penelitian

3.2.1 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap BOPO

Nilai signifikansi pada variabel Dewan Direksi (X_1) adalah $0,000 < 0,05$, dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Dewan Direksi (X_1) berpengaruh signifikan terhadap BOPO (Y).

3.2.2 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap BOPO

Nilai signifikansi pada variabel Dewan Komisaris (X_2) adalah $0,955 > 0,05$, dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Dewan Komisaris (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap BOPO (Y). Hal ini karena jumlah dewan komisaris pada perusahaan sampel rata-rata sudah tinggi, sehingga kurang mempengaruhi efisiensi perusahaan.

3.2.3 Pengaruh Kepemilikan Konstitusional Terhadap BOPO

Nilai signifikansi pada variabel Kepemilikan Institusional (X_3) adalah $0,322 > 0,05$, dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Kepemilikan Institusional (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap BOPO (Y). Hal ini karena tingkat kepemilikan institusional di perusahaan yang menjadi sampel penelitian masih rendah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap BOPO. Hal ini karena Dewan Direksi berperan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan digunakan baik kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang.
2. Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap BOPO. Hal ini karena Dewan Komisaris hanya berperan mengawasi kinerja Dewan Direksi, sedangkan pengelolaan perbankan sepenuhnya dilaksanakan oleh Dewan Direksi, sehingga keberadaan Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi perbankan.

3. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap BOPO. Hal ini karena tingkat kepemilikan institusional di perusahaan yang menjadi sampel penelitian masih rendah.
4. Uji F menunjukkan bahwa F hitung secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu BOPO.
5. Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama memberikan sumbangan terhadap variabel terikat dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian.

Referensi:

- [1] Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- [2] Effendi, M. A. (2016). *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- [3] Frans, K., & Tirayoh, Z. (2017). Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. BNI Tbk Kantor Cabang Pembantu Unsrat. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12 (1).
- [4] Jensen, M. C. (1986). Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. *AEA Papers and Proceedings*, 76(2): 323-329.
- [5] Huri, M. D., & Susilowati, I. (2004). Pengukuran Efisiensi Relatif Emiten Perbankan Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) (Studi Kasus: Bank-Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Tahun 2002). *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP)*, 1(2): 95-110.
- [6] Chen, L., Liu, C., & Wang, G. (2013). Financial constraints, investment efficiency and corporate governance: Empirical evidence from China. *The 10th International Conference on Service Systems and Service Management-Proceedings of ICSSSM*, 445–449.
- [7] Simanungkalit. (2017). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Efisiensi Investasi Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15 (2) : 179-199.
- [8] Jama'an. (2007). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, dan Kualitas Kantor Akuntan Publik Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Tesis*. Universitas Diponegoro.